



**IMPLEMENTASI *TRAFFICKING VICTIM PROTECTION ACT* (TVPA)
OLEH PEMERINTAHAN BARACK OBAMA
DALAM MENANGANI *HUMAN TRAFFICKING* DI MEKSIKO
TAHUN 2008-2012**

Ummu Ulfah Hanifah

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Being a country located in a border with the United States (U.S.), Mexico had become a source and transit place for people who were vulnerable to human trafficking. The huge numbers of human trafficking victims from Mexico in the U.S. enforced Barack Obama's governance made actions as efforts to cope the human trafficking issue. The efforts that had been made by considering Trafficking Victim Protection (TVPA) year 2000 with its prosecution, protection, and prevention approach were given mandate to the U.S. Department of State to evaluate and help Mexico. The objective of this study is to find out the efforts made by the U.S. in combating the human trafficking in Mexico. Case study and descriptive approach that were used had found out the improvements in Mexico's government efforts through reformation of the constitution, victim protection, and trafficking campaign as the influence of the U.S. efforts.

Keywords: *human trafficking, TVPA, prosecution, protection, prevention*

1. Pendahuluan

Human trafficking menjadi masalah signifikan bagi Amerika Serikat. Sekitar 14.500 hingga 17.500 orang, terutama wanita dan anak menjadi korban *trafficking* ke Amerika Serikat tiap tahunnya (www.refworld.org, 2008). Amerika Serikat seringkali menjadi tujuan pelaku *human trafficking* dalam memperdagangkan korbannya yang berasal dari negara berkembang seperti Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin (www.state.gov, 2013). Di sisi lain, dikarenakan letak geografis dan kondisi

ekonominya, Meksiko merupakan titik masuk dan tempat asal dari 18.000 korban *trafficking* ke Amerika Serikat setiap tahunnya (www.csis.org, 2004).

Setiap tahunnya, terdapat sekitar 450.000 warga negara Meksiko tanpa dokumen yang masuk ke Amerika Serikat (www.mac.iom.int, 2014). Agar dapat memasuki Amerika Serikat, seringkali mereka membayar “*coyotes*” atau *immigrant smugglers* yang kemudian memperbudak dan menjerumuskan mereka ke dalam *human trafficking* (www.coha.org, 2009). Secara khusus, perempuan dan anak-anak di Meksiko merupakan komoditas berharga bagi pelaku *sex trafficking* untuk memenuhi permintaan dari Amerika Serikat (www.cia.gov, 2000). Banyaknya korban *human trafficking* dari Meksiko ke Amerika Serikat juga didorong adanya kebutuhan akan buruh murah di industri pertanian di Amerika Serikat (www.borderlegislators.org). Hal tersebutlah yang menyebabkan migran rentan terhadap *human trafficking*.

Dalam perlawanan terhadap *human trafficking*, Amerika Serikat menjuluki dirinya sebagai negara pemimpin. Oleh karena itu, Amerika Serikat melakukan upaya-upaya perlawanan terhadap *human trafficking* baik di dalam maupun luar negeri (www.whitehouse.gov, 2013). Sebagai respon terhadap pentingnya perlawanan terhadap *human trafficking*, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan *the Trafficking Victims Protection Act* tahun 2000 (TVPA) yang ditandatangani presiden Bill Clinton pada 28 Oktober 2000 dan dilanjutkan hingga pemerintahan Obama. TVPA sendiri merupakan bagian dari *Victims of Trafficking and Violence Protection Act* tahun 2000. Sejak pemberlakuan undang-undang tersebut, upaya *anti-trafficking* semakin diperkuat di Amerika Serikat (Alison Siskin: 2013, 1).

Di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama, pemerintah Amerika Serikat menjadikan upaya *anti-trafficking* sebagai prioritas negara (www.state.gov, 2011). Sebagai seseorang yang berkulit hitam, terpilihnya Obama menjadi presiden menghapus kesenjangan rasial dan stigma perbudakan dalam politik Amerika Serikat (www.nytimes.com, 2008). Amerika Serikat dibawah pemerintahan Obama terus melakukan kerjasama dengan Meksiko sebagaimana yang telah diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat George W Bush dan Presiden Meksiko Felipe Calderon pada tahun 2007 (Clare Selke: 2015, 1). Kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan TVPA dengan ketiga pendekatannya yakni *prosecution*, *protection*, dan *prevention*.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dibahas adalah bagaimana implementasi kebijakan Amerika Serikat berdasarkan TVPA di Meksiko. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan *anti-trafficking* Amerika Serikat di Meksiko melalui TVPA pada pemerintahan Barack Obama. Paradigma yang digunakan adalah paradigm konstruktivisme linguistik yang menjelaskan bahwa TVPA merupakan bagian dari *speech act*. Dalam hal ini, TVPA dapat diinterpretasikan sebagai ‘permainan bahasa’ atau ‘tindak tutur’ Amerika Serikat dalam upaya mengkonstruksikan negara lain, termasuk Meksiko sebagai negara yang berbahaya karena melanggengkan *human trafficking*.

Berdasarkan pandangan itulah Amerika Serikat melakukan kampanye perlawanan terhadap *human trafficking* (*anti-trafficking*) yang dilakukan berdasarkan TVPA.

2. Pembahasan

Human trafficking merupakan permasalahan keamanan yang berhubungan dengan migrasi (www.wola.org, 2013). Semakin dekat perbatasan dan semakin menarik negara tujuan, maka semakin banyak pula potensi imigran ilegal yang terjebak dalam *human trafficking*. Imigran tersebut seringkali dijebak oleh kelompok kriminal yang pada mulanya melakukan *smuggling* namun akhirnya mereka memasukkan korbannya kedalam *trafficking* (Raimo Väyrynen, 2003: 1).

Sebagai negara maju yang memiliki ekonomi kuat dan berbasis perdagangan, Amerika Serikat mengandalkan masuknya buruh migran untuk memenuhi kebutuhan produsen dan penyedia jasa. Di sisi lain, Meksiko merupakan titik mulai, maupun tempat transit bagi orang-orang dari Amerika Latin yang ingin memasuki Amerika Serikat secara ilegal (The Heritage, 2011: 20). Akan tetapi, proteksi hukum yang lemah bagi pekerja migran serta ketatnya wilayah perbatasan meningkatkan kerentanan terhadap masuknya mereka ke dalam jaringan *trafficking*.

Berdasarkan gender, imigran perempuan berada pada posisi yang lebih rentan apabila dibandingkan dengan imigran laki-laki. Hal ini dikarenakan mereka mendapatkan kerentanan ganda akibat keadaan mereka yang merupakan migran dan sifat harfiah perempuan yang secara fisik lebih lemah daripada laki-laki. Naiknya jumlah perempuan yang terlibat dalam proses migrasi dikarenakan terbatasnya kesempatan kerja yang ada serta terjadinya kemiskinan di daerah asal (Acharya: 2010, 10).

Selain perempuan, anak-anak yang melakukan migrasi tanpa pendamping juga rentan terhadap *trafficking*. Dari tahun 2008 hingga 2012, dibandingkan negara lain, Meksiko merupakan sumber terbesar dari migrasi anak-anak tanpa pendamping di Amerika Serikat (www.wola.org, 2015). Tingginya angka kemiskinan dan kekerasan serta adanya rumor bahwa anak-anak tanpa pendamping yang tiba di perbatasan tidak akan dideportasi ke negara asalnya menjadi faktor pendorong anak-anak untuk berpindah ke Amerika Serikat. (www.pewresearch.org)

Tumbuh dan berkembangnya *human trafficking* dilatar belakangi oleh faktor ekonomi yang mengikuti model persediaan dan permintaan (*demand and supply*). Selain itu, kemiskinan serta adanya janji palsu atas “*American Dream*” mendorong seseorang untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Amerika (Hemisphere Focus: 2004, 1-5; www.dhs.gov).

Dalam mengangkut korbannya, pelaku *trafficking* menggunakan cara dan rute yang sama sebagaimana mengangkut korban *smuggling* (Richard, 2000: 17). Cara-cara yang legal mereka gunakan untuk melakukan pengangkutan dengan tujuan yang ilegal. Mereka memanfaatkan sarana transportasi privat maupun publik seperti pengangkut kapal,

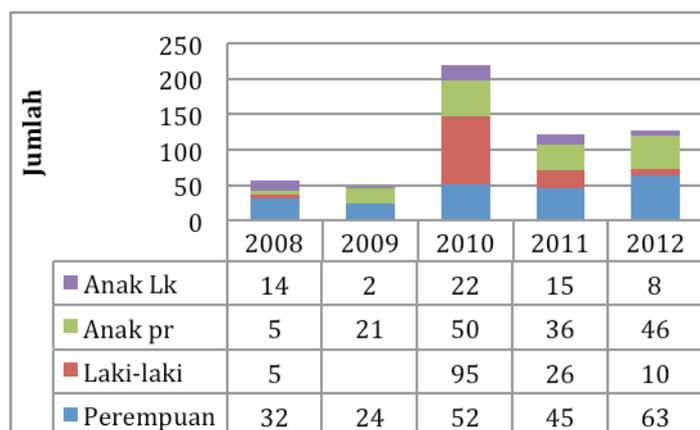
supir taksi, pengendara sepeda (becak), dan truk (Langberg, 2005: 134). Dengan cara ini, pelaku *trafficking* menjadi sulit untuk ditangkap dan diberi hukuman.

Di Amerika Serikat, baik warga negara Amerika Serikat maupun warga negara asing ditemukan terjebak dalam *sex trafficking* dan *forced labor*. Berdasarkan jenis pekerjaannya, kebanyakan warga Amerika Serikat dipekerjakan sebagai *sex trafficking* dan warga negara asing dipekerjakan sebagai *forced labor* (TIP Report, 2015; www.bjs.gov, 2011). Korban seringkali dibujuk dari luar Amerika Serikat dengan janji palsu atas kesempatan ekonomi yang lebih baik atau janji romansa oleh seseorang yang kemudian memaksa mereka untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Mereka seringkali dipekerjakan di industri seks, perbudakan dalam rumah tangga atau di pabrik (www.justice.gov, 2013).

Pelaku *human trafficking* dari Meksiko ke Amerika Serikat berasal dari anggota keluarga, kejahatan terorganisir, maupun pejabat publik (www.state.gov, 2013). Dalam menjalankan aksinya, pelaku seringkali menggunakan kekerasan, pemerkosaan, serta ancaman kepada keluarga korban demi memperoleh tujuannya (www.heritage.org, 2011). Pada kasus *forced labor*, korban dari Meksiko seringkali dibawa ke Amerika Serikat oleh pelaku yang berkewarganegaraan atau beretnis sama maupun penduduk naturalisasi Amerika Serikat seperti kelompok etnis Meksiko-Amerika (Free the Slaves, 2004: 13).

Di sisi lain, kelompok yang paling rentan terhadap *human trafficking* di Meksiko adalah perempuan, anak-anak, penduduk asli, orang yang memiliki cacat mental atau fisik, migran, dan *lesbian, gay, bisexual, transgender* (LGBT) (TIP Report 2014). Hampir semua golongan baik perempuan, laki-laki, transgender, anak-anak maupun dewasa yang berasal dari Meksiko dieksploitasi dalam *sex trafficking* di perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat (TIP Report 2015). Sedangkan apabila berdasarkan umur dan gender, korban *human trafficking* dari tahun 2008 hingga 2012 digambarkan pada Grafik 1.

Grafik 1
Jumlah Korban *Human Trafficking* Berdasarkan Umur dan Gender (2008-2012)



Sumber: www.unodc.org, 2014

Berdasarkan Grafik 1 di atas, dari tahun 2008 hingga 2012 perempuan dewasa merupakan mayoritas korban *human trafficking* di Meksiko dengan jumlah total 216 orang. Anak perempuan kemudian menempati urutan kedua dengan jumlah 156 disusul laki-laki dan anak-laki laki. Salah satu faktor yang mendorong banyaknya perempuan yang menjadi korban *trafficking* adalah migrasi yang mereka lakukan. Migrasi tersebut didorong oleh adanya pengangguran, kemiskinan, kejahatan berbasis gender, penganiayaan, penelantaran oleh suami, kurangnya edukasi, juga korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah (Acharya, 2010: 20).

Keterlibatan pejabat pemerintah terutama penegak hukum lokal dan pejabat imigrasi, dilakukan melalui penerimaan atau tindakan penyuaipan, menghalangi pelaporan korban, membiarkan aktivitas *human trafficking* terjadi (TIP Report 2009). Beberapa pejabat juga menjadi pengguna layanan seksual yang ditawarkan oleh bisnis prostitusi, memeras migran yang menjadi korban *trafficking*, memalsukan dokumen korban, serta memfasilitasi perpindahan korban di perbatasan (TIP Report 2015).

Pada tahun 2011, jumlah orang yang dituntut atas *human trafficking* juga meningkat. Hal tersebut disebabkan kerjasama Amerika Serikat-Meksiko melalui *Merida Initiative* sejak tahun 2008 menghasilkan penangkapan dan pemenjaraan pemimpin kartel narkoba. Kesuksesan *Merida Initiative* dalam menangani kartel narkoba tersebut membuat organisasi kriminal yang ada terpecah dan mengubah aktivitas kejahatannya menjadi kejahatan lain seperti *human trafficking* (www.ncdps.gov, 2012).

Adanya *human trafficking* berdampak pada segi politik, sosial, ekonomi, maupun individu korban dari kedua negara. *Trafficking* dapat menciptakan lingkungan kekerasan, ketakutan, perpisahan anggota keluarga, mengikis ikatan sosial, dan merusak prospek ekonomi dari suatu komunitas. Terlebih, karena difasilitasi oleh jaringan kriminal terorganisir yang berhubungan dengan perdagangan senjata dan narkoba, *human trafficking* dapat membahayakan keamanan negara dengan memperlemah aturan hukum, merusak sistem kesehatan dan mengancam keamanan publik (UN Newsletter, 2009).

Dalam menghadapi *human trafficking* di dunia, Amerika Serikat menciptakan undang-undang domestiknya yakni TVPA dan berusaha menginternasionalisikannya, terutama di Meksiko yang merupakan negara asal dan transit dari korban *human trafficking* ke Amerika Serikat. Berdasarkan TVPA, respon pemerintah Amerika Serikat terhadap *trafficking* diberikan (TIP Report 2014).

TVPA dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengatasi *human trafficking* melalui program bantuan internasional dan domestik bagi korban maupun penegak hukum, membuat undang-undang kriminal baru, dan melakukan pengawasan efektivitas dan implikasi kebijakan anti *human trafficking* (Alison Siskin: 2013,1). Dengan landasan TVPA, pemerintah Amerika Serikat memerintahkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk membuat laporan tahunan yang menilai kemajuan yang dimiliki oleh berbagai negara dalam mencapai standar minimal perlawanan

terhadap *human trafficking* (www.state.gov). Laporan tersebut dinamakan *Trafficking in Person Report* atau TIP Report.

Dalam pelaporannya, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menempatkan setiap negara kedalam empat tingkatan atau *tier* berdasarkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah negara tersebut. *Tier 1* merupakan negara yang telah memenuhi standar minimum perlawanan terhadap *human trafficking*, *tier 2* merupakan negara yang belum memenuhi standar tetapi telah melakukan upaya dalam memenuhinya, sedangkan *tier 2 watch list* diberikan pada negara dengan upaya yang sama seperti *tier 2* namun memiliki jumlah atau kenaikan jumlah korban yang signifikan. Negara dengan upaya perlawanan terhadap *human trafficking* terburuk ditempatkan pada *tier 3* dan bagi negara tersebut, Amerika Serikat berhak memberikan sanksi *non-humanitarian* atau *non-trade*.

Untuk mengatur *human trafficking* baik domestik maupun internasional, undang-undang tersebut menyediakan tiga pendekatan yakni *prosecution* yang berusaha membuat undang-undang kejahatan federal yang baru, *protection* yang memberikan izin tinggal dan pelayanan bagi korban *human trafficking* yang berkewarganegaraan asing, serta *prevention* yang berupaya melakukan pencegahan melalui kampanye kesadaran publik di seluruh dunia, program evaluasi, dan pemberian sanksi yang dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (www.rescue.org).

Dalam menangani kasus *human trafficking* di Meksiko, lembaga federal Amerika Serikat bekerjasama dengan lembaga yang setara di Meksiko. Lembaga-lembaga tersebut yakni *the Department of Homeland Security*, *the Department of Justice*, *the Department of State* dan *USAID Mexico* dari Amerika Serikat dan Kantor Kejaksaan Umum (*Procuraduría General de la Republica, PGR*), *the federal Public Security Secretariat*, dan *the National Migration Institute* dari Meksiko (www.borderlegislator.org). Selain itu, di Meksiko terdapat *The Special Prosecutor for Violence Against Women and Human Trafficking* (FEVIMTRA) yang menjalankan program dan perlindungan bagi korban *human trafficking* dan *Mexico's National Commission on Human Rights* yang merupakan gugus kerja federal yang secara khusus menangani isu *trafficking* (www.state.gov).

Berdasarkan TVPA, Senat Amerika Serikat mengesahkan bantuan keuangan luar negeri yang ditujukan untuk perlawanan terhadap *human trafficking*. Bantuan tersebut disalurkan melalui *The Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons (J/TIP)* di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (www.state.gov). Tujuan dari bantuan tersebut adalah untuk membangun kapasitas dan kemampuan negara lain dalam mencegah *trafficking*, melindungi korban, dan memproses pelaku *trafficking* melalui jalur hukum (*prevention, protection, prosecution*) (www.fas.org).

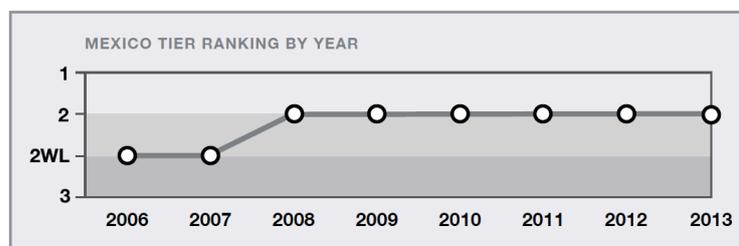
Selama tahun 2008 hingga 2012, bantuan pendanaan Amerika Serikat untuk mengatasi *human trafficking* di Meksiko berjumlah total 16.086.955 US\$. Berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, pada tahun 2008, pengeluaran Amerika Serikat untuk Meksiko sejumlah US\$ 480000 yang kemudian meningkat menjadi

US\$ 5.876.532 pada 2009, US\$ 5.940.978 pada 2010, US\$ 3.109.445 pada 2011, dan US\$ 680.000 pada 2012 (TIP Report 2008-2013).

Selain bantuan luar negeri, Amerika Serikat melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Meksiko melalui *TIP Report*. *Tier* Meksiko ditunjukkan pada Grafik 2.

Grafik 2

Ranking (*Tier*) Meksiko Tahun 2006-2013



Sumber: TIP Report 2013

Berdasarkan Grafik 2 di atas, Meksiko terus menempati *tier 2* dari tahun 2008 hingga 2012. Selama lima tahun tersebut, Meksiko ditempatkan dalam *tier 2* karena Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menganggap bahwa pemerintah Meksiko belum memenuhi standar minimum perlawanan terhadap *trafficking* walaupun telah melakukan upaya untuk memenuhinya (TIP Report 2013).

Selain pelaporan dari negara lain, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, dan *Homeland Security* Amerika Serikat juga membuat daftar produk asing yang diproduksi oleh *forced labor* (www.fas.org). Amerika Serikat juga memproses hak pekerja melalui kebijakan ekonomi dan perdagangan serta mencegah partisipasi pemerintah Amerika Serikat dalam *trafficking* di luar negeri.

Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan Amerika Serikat berdasarkan TVPA di Meksiko, digunakan lima indikator yakni (1) peringkat *Tier* Meksiko tahun 2008-2012, (2) implementasi undang-undang *anti-trafficking* yang diinisiasi TVPA (3) pengaruh TVPA bagi peningkatan penuntutan dan penghukuman (4) perlindungan terhadap korban *human trafficking* (5) jumlah korban *human trafficking* di Meksiko (Heather J. Clawson: 2006, 9).

Sejak 2008 hingga 2012, Meksiko tetap berada di *tier 2* (Grafik 2.1). Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan laporan yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Meksiko masih belum memenuhi standar perlawanan terhadap *human trafficking* meskipun bantuan luar negeri yang didasarkan pada pendekatan yang tercantum di TVPA telah diberikan. Sedangkan apabila dilihat dari implementasi undang-undang *anti-trafficking* di Meksiko, terdapat perbaikan dan reformasi yang terjadi sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1
Undang-undang *Anti-Trafficking* di Meksiko tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah dan Jenis Undang-Undang
2008	- -
2009	- 22 negara bagian memberlakukan undang-undang <i>anti-trafficking</i> parsial
2010	- Negara bagian melakukan reformasi undang-undang pidana - 9 telah memberlakukan undang-undang <i>anti-trafficking</i> spesifik
2011	- Negara bagian melakukan reformasi undang-undang pidana - 18 negara bagian telah memberlakukan undang-undang <i>anti-trafficking</i> spesifik
2012	- 32 negara bagian melakukan reformasi undang-undang pidana - 22 negara bagian telah memberlakukan undang-undang <i>anti-trafficking</i> spesifik

Sumber: TIP Report 2008-2013

Berdasarkan tabel di atas, penetapan undang-undang *anti-trafficking* di Meksiko mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Meskipun awalnya hanya 22 negara bagian yang memberlakukan undang-undang *anti-trafficking* parsial, namun pada tahun selanjutnya seluruh negara bagian telah melakukan reformasi undang-undang.

Dalam jumlah penuntutan dan penghukuman pelaku *trafficking*, dari tahun 2008 hingga 2012, berdasarkan *TIP Report* yang dibuat oleh Amerika Serikat, jumlah penghukuman (*conviction*), investigasi (*investigation*), maupun penuntutan (*prosecution*) yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga dibawahnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Jumlah Penghukuman, Investigasi, dan Penuntutan Kasus *Human trafficking*
di Meksiko tahun 2008-2012

Tahun	Penghukuman	Investigasi	Penuntutan
2008	Tidak ada	24 FEVIMTRA Total : 24	-
2009	6 (penghukuman pertama kali)	48 Federal dan Negara Bagian Total: 48	-
2010	4 oleh Mexico city 1 oleh FEVIMTRA Total: 5 penghukuman	76 FEVIMTRA Total : 76	47 FEVIMTRA 4 Mexico City Total: 51
2011	14 oleh federal & state 4 oleh SEIDO 2 oleh negara bagian Puebla 2 oleh negara bagian Chiapas 1 oleh negara bagian yucatan Tot: 23 penghukuman	67 FEVIMTRA 4 Negara bagian Puebla Total : 71	-
2012	2 oleh FEVIMTRA 12 oleh Federal 2 oleh negara bagian Puebla 4 oleh negara bagian Tlaxcala 2 oleh negara bagian Sonora 2 oleh negara bagian Chiapas Tot: 24 penghukuman	72 FEVIMTRA 24 UEITMPO Total: 96	3 UEITMPO Total: 3

Sumber: TIP Report 2008-2015

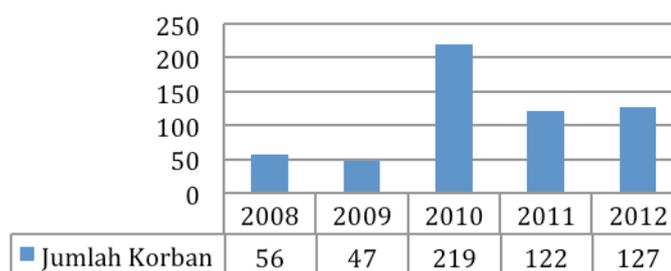
Berdasarkan Tabel 2, terdapat jumlah peningkatan penghukuman dari tahun 2008 yang semula tidak ada hingga tahun 2012 yang berjumlah 24 penghukuman. Begitu juga dalam investigasi. Jumlah investigasi dari tahun ke tahun relatif meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan upaya *prosecution* Meksiko dalam menangani kasus *human trafficking*.

Apabila dinilai dari perlindungan terhadap korban *trafficking*, terdapat kenaikan kebijakan *prosecution* yang dilakukan oleh pemerintah Meksiko. Meskipun demikian, tempat perlindungan yang ada seringkali ditujukan untuk korban *sex trafficking* dan perempuan sedangkan korban laki-laki kurang mendapat perhatian. Selain itu, korban

human trafficking juga digabungkan dengan korban dari kejahatan lainnya. Dari tahun 2008 hingga 2012, terdapat penurunan pendanaan bagi tempat perlindungan korban *human trafficking* dari yang semula US\$ 3,4 juta menjadi US\$ 100.000.

Selanjutnya, meskipun pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko telah mengalokasikan pendanaan dalam kampanye *anti-trafficking* beserta upaya-upaya pencegahan lainnya, namun dari tahun 2008 hingga 2012 terjadi peningkatan jumlah korban *trafficking* yang terdata dan dikumpulkan oleh UNODC. Jumlah tersebut digambarkan pada Grafik 3.

Grafik 3
Jumlah Korban *Human Trafficking* Meksiko 2008-2012



Sumber: www.unodc.org, 2012

Berdasarkan grafik di atas, jumlah korban *trafficking* mengalami kenaikan dan penurunan sejak tahun 2008. Namun, kenaikan drastis terjadi pada tahun 2010 disebabkan penangkapan dan pemenjaraan pemimpin kartel narkoba membuat aktivitas organisasi kriminal tersebut berganti arah menjadi *human trafficking* (www.ncdps.gov). Oleh karena itu, apabila dilihat dari kenaikan dan penurunan jumlah korban *human trafficking* di Meksiko, tidak terdapat pengaruh signifikan dari kebijakan Amerika Serikat dan jumlah *human trafficking* di Meksiko.

Apabila dilihat berdasarkan kelima indikator implementasi TVPA di Meksiko, meskipun terdapat perbaikan dalam undang-undang *anti-trafficking* dan adanya peningkatan jumlah penuntutan dan penghukuman, akan tetapi tidak terdapat signifikansi pengaruh kebijakan Amerika Serikat di Meksiko. Hal tersebut dapat dilihat dari stagnasi peringkat *Tier* Meksiko tahun 2008-2012 yang terus berada di *Tier 2* dan menurunnya pendanaan bagi perlindungan korban *human trafficking*. Selain itu, masih terdapat kenaikan dan penurunan jumlah korban *human trafficking* di Meksiko selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan *anti-trafficking* yang dilakukan Amerika Serikat di Meksiko tidak membuat jumlah korban *human trafficking* menurun.

3. Kesimpulan

Amerika Serikat menjadi tujuan utama bagi korban *human trafficking* dari Meksiko. Kasus *human trafficking* Amerika Serikat-Meksiko berhubungan erat dengan adanya migrasi karena orang-orang yang bermigrasi seringkali terjebak dalam *trafficking*. Baik laki-laki perempuan, dewasa, maupun anak-anak dilaporkan menjadi korban *human trafficking*. Korban-korban tersebut seringkali dipekerjakan melalui *sex trafficking* maupun *forced labor*. Di sisi lain, pelaku *human trafficking* di Amerika Serikat dan Meksiko terdiri dari kelompok kejahatan terorganisir, *smuggler* yang menyalahgunakan kepercayaan korbannya, keluarga terdekat, bahkan orang tua. Aktor pemerintah juga dilaporkan masih terlibat dalam *trafficking* dengan melakukan korupsi, penyuapan, menghalangi pelaporan, dan membiarkan *trafficking* terjadi.

Kepedulian terhadap *human trafficking* membuat Amerika Serikat di bawah pemerintahan Barack Obama membentuk undang-undang *anti-trafficking* domestik yakni *Trafficking Victim Protection Act* (TVPA) tahun 2000 dan menginternasionalisikannya. Melalui undang-undang tersebut, Amerika Serikat mendorong Meksiko untuk mencontoh upaya perlawanan *human trafficking* di Amerika Serikat dan memberikan bantuan pendanaan serta evaluasi yang dilakukan melalui tiga pendekatan yakni *prosecution*, *protection*, dan *prevention*.

Setelah dilakukannya pemberian bantuan melalui bantuan pendanaan luar negeri, pelaporan tahunan yang berisi evaluasi dan rekomendasi bagi Meksiko, serta upaya pencegahan melalui *blacklisting* produk luar negeri, pembatasan bantuan luar negeri, promosi hak pekerja melalui kebijakan perdagangan, dan pencegahan keterlibatan pejabat Amerika Serikat dalam *trafficking* di luar negeri, ditemukan kurangnya pengaruh signifikan dari implementasi kebijakan *anti-trafficking* melalui TVPA. Hal ini dibuktikan dengan adanya stagnasi peringkat *tier* Meksiko tahun 2008-2012 yang terus berada di *Tier 2* dan menurunnya pendanaan bagi perlindungan korban *human trafficking*. Selain itu, masih terdapat kenaikan dan penurunan jumlah korban *human trafficking* di Meksiko selama periode tersebut.

Daftar Pustaka

- _____. (2008). Review of UNHCR efforts to prevent and respond to human trafficking. *UNHCR*. Dalam <http://www.refworld.org/pdfid/4d10b54f2.pdf>. Diunduh pada 7 Juni 2014.
- _____. (2013). TIP Report 2012. *Laporan Penelitian*. U.S. Department of State Dalam <http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf>. Diunduh pada 7 Juni 2014.
- _____. Binational State Level Human Trafficking Report. *Laporan Penelitian*. Border Legislator. Dalam <http://www.borderlegislators.org/pdfs/Binational%20State-level%20Human%20Trafficking%20Report.pdf>. Diunduh pada 5 Agustus 2015
- _____. (2008). Polaris Project – Trafficking Victims’ Protection Act (TVPA) – Fact Sheet. *Laporan Penelitian*. Polaris Project. Dalam <http://www.rescue.org/sites/default/files/resource->

- file/trafficking%20victims%20protection%20act%20fact%20sheet_0.pdf.
Diunduh pada 14 Juli 2015.
- _____. HT Final Report. Dalam http://www.borderlegislators.org/pdfs/Publications/HT_Final_Report_ADA.PDF.
- _____. (2008). US Politics Campaign. Dalam <http://www.nytimes.com/2008/11/05/us/politics/05campaign.html?pagewanted=all>. Diunduh pada 15 November 2015.
- _____. (2014). Children 12 and under are fastest growing group of unaccompanied minors at U.S. border. Dalam <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/07/22/children-12-and-under-are-fastest-growing-group-of-unaccompanied-minors-at-u-s-border/>. Diunduh pada 15 Juli 2015.
- Acharya, Arun Kumar. Feminization of Migration and Trafficking of Women in Mexico. Dalam http://www.rcis.ro/images/documente/rcis30_02.pdf. Diunduh pada 14 Oktober 2015.
- COHA. (2009). Modern Day Slavery in Mexico and the United States. Dalam <http://www.coha.org/modern-day-slavery-in-mexico-and-the-united-states/>. Diunduh pada 1 Agustus 2014
- CSIS. (2004). *Slavery Without Border: Human Trafficking in the US-Mexican Context*. Dalam http://csis.org/files/media/csis/pubs/hf_v12_05.pdf. Diunduh pada 5 November 2015.
- DHS. Human Interest Stories. Dalam <http://www.dhs.gov/blue-campaign/human-interest-stories>. Diunduh pada 16 Juli 2015.
- DOJ. Impact of Human Trafficking On Victims. Dalam <http://www.justice.gov/usao-ndia/human-trafficking-response-team/impact-human-trafficking-victims>. Diunduh pada 10 Juli 2015
- DOS. (2009). Trafficking in Person Report: Fiscal Year 2008.
- DOS. (2010). Trafficking in Person Report: Fiscal Year 2009.
- DOS. (2011). Trafficking in Person Report: Fiscal Year 2010.
- DOS. (2012). Trafficking in Person Report: Fiscal Year 2011.
- DOS. (2013). Trafficking in Person Report: Fiscal Year 2012.
- DOS. (2014). Trafficking in Person Report: Fiscal Year 2013.
- DOS. (2015). Trafficking in Person Report: Fiscal Year 2014.
- DOS. (2011). New Interagency Initiatives To Combat Trafficking in Persons. Dalam <http://www.state.gov/j/tip/rls/rm/2011/155833.htm>. Diunduh pada 15 Agustus 2015.
- DOS. (2013). Funding Innovation and Forging Partnerships: J/TIP Program Priorities. Dalam <http://www.state.gov/j/tip/rls/fs/2013/211636.htm>. Diunduh pada 20 Agustus 2015.
- IOM. (2014). Mexico. Dalam <http://mac.iom.int/cms/en/sites/iom/home/where-we-work/americas/central-and-north-america-and-th/mexico.default.html?displayTab=map>. Diunduh pada 15 Agustus 2015.
- Langberg, Laura. (2005). A Review of Recent OAS Research on Human Trafficking in the Latin American and Caribbean Region. Pg. 129-139. *Blackwell Publishing*, Oxford.

- Raimo Väyrynen. (2003). Illegal Immigration, Human Trafficking, and Organized Crime. Dalam http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/discussion-papers/2003/en_GB/dp2003-072/files/78091733799863273/default/dp2003-072.pdf. Diunduh pada 18 Agustus 2015.
- Richard, Amy O’Niell. (2000). International Trafficking in Women to the United States: A Contemporary Manifestation of Slavery and Organized Crime. *Center for the Study of Intelligence*. Dalam <https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/trafficking.pdf>. Diunduh pada 10 November 2015
- Seelke, Clare Ribando dan Kristin Finklea. (2015). U.S.-Mexican Security Cooperation: The Merida Initiative and Beyond. *Congress Research Service*. Dalam <https://www.fas.org/sgp/crs/row/R41349.pdf>. Diunduh pada 10 November 2015.
- Shirk, David, and Alexandra Webber. (2004). Slavery Without Borders: Human Trafficking in the U.S.-Mexican Context. *Hemisphere Focus* XII (5):1-5.
- Siskin, Alison dan Lyana Sun Wyler. (2013). Trafficking in Persons: U.S. Policy and Issues for Congress. Dalam <https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34317.pdf>. Diunduh pada 17 Agustus 2015
- The White House. (2013). End Human Trafficking. Dalam <https://www.whitehouse.gov/issues/foreign-policy/end-human-trafficking>, Diunduh pada 1 Agustus 2015
- The White House. Transnational Organized Crime: A Growing Threat to National and International Security. Dalam <https://www.fas.org/sgp/crs/row/R42956.pdf>. Diakses pada 10 Oktober 2014.
- UNODC. (2014). Human trafficking: people for sale. Dalam <http://www.unodc.org/toc/en/crimes/human-trafficking.html>. Diunduh pada 7 Juni 2014.
- UNODC. Global Programme Against Trafficking in Human Beings. Dalam <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html>. Diunduh pada 17 Juni 2014